**RENCANA AKSI
KESIAPSIAGAAN DAN ANTISIPASI
KEBAKARAN HUTAN, LAHAN DAN PEKARANGAN YANG
BERPOTENSI KABUT ASAP SERTA KEKERINGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2016**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JI. PAKUNEGARA NO. 32 TELP.(0532)27772 FAX. (0532)27773
EMAIL:bpbd_kobar@yahoo.co.id PANGKALAN BUN 74114
KALIMANTAN TENGAH**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang maha Esa bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Telah dibentuk di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat, pada tanggal, 25 Januari 2012, tugas utama BPBD adalah menangani masalah kebencanaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya yang secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis merupakan wilayah rawan bencana serta tugas-tugas sosial lainnya.

Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Terhadap Kebencanaan, sudah seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya meningkatkan kinerjanya diantaranya melakukan kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap kebencanaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berkaitan dengan kerjasama dengan Badan Usaha/ Perusahaan serta unsur-unsur penanggulangan bencana lainnya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun Rencana Aksi kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang berpotensi kabut asap serta kekeringan sebagai dasar Panduan dalam melaksanakan Kegiatan dilapangan sehubungan Pelayanan dalam Penanganan Bencana bersama baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun oleh manusia sehingga dalam penanggulangannya dapat dilakukan tindakan yang cepat, terencana, terorganisir, terkordinasi dan terpadu.

Dengan dibuatnya Rencana Aksi kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang berpotensi kabut asap serta kekeringan ini diharapkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat terkait kerjasama antara Pihak BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Badan Usaha/ Perusahaan serta unsur-unsur penanggulangan bencana lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penanganan Penanggulangan Bencana sesuai tugas pokok dan fungsi sehingga dapat terlaksana secara efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna serta pada akhirnya akan memberikan dampak kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan.

Kami menyadari bahwa Rencana Aksi kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang berpotensi kabut asap serta kekeringan ini tidak sempurna, oleh karenanya kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan pelayanan yang diberikan, dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pelayanan, demikian Kata Pengantar ini kami buat, terimakasih.

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,**

Drs. HERMON, M.Si
NIP. 19681129 198709 1 001

**RENCANA AKSI TERPADU
KESIAPSIAGAAN DAN ANTISIPASI
KEBAKARAN HUTAN, LAHAN DAN PEKARANGAN SERTA
KEKERINGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2016**

I. Situasi Umum

Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Ibukota Pangkalan Bun terletak di Daerah Khatulistiwa diantara 1° 19' s/d 3° 36' Lintang Selatan dan 110° 25's/d 112° 50' bujur Timur. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten terluas di Kalimantan Tengah dengan luas wilayah mencapai 10.579 km². Namun berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. SK.529/Menhut-II/2012, total luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 765.096.94 Ha, yang terdiri dari :

- Kawasan hutan 615,529.69 Ha
- Kawasan Non Hutan 149,567.26 Ha

Kebencanaan yang kerap terjadi dan berdasarkan data-data kebencanaan tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan merupakan bencana yang harus diwaspadai dan memerlukan penanganan sejak dini. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya melaksanakan program-program yang diharapkan nantinya dapat memberikan efek pengurangan resiko bencana, kerugian material serta korban jiwa.

Prediksi Kemarau berdasarkan Pantauan Badan Metereologi dan Gefisika Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai pada bulan juli s/d september, untuk itu dibutuhkan kesiapan dari seluruh elemen terkait dalam peningkatan kesiapsiagaan dan Pencegahan serta Penanganan dalam menghadapi resiko bencana tersebut.

Dari pantauan TIM Patroli dan Data Kebakaran Hutan Tahun 2015 Luas Daerah yang terdampak kebakaran adalah ± **17.831 Hektar** yang tersebar di 6 (Enam) Kecamatan, sedangkan untuk Bencana Kekeringan titik rawan berada di 4 Kecamatan, yaitu Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, Kumai dan Arut Utara yang terdiri dari masyarakat yang terdampak sejumlah ± 2445 KK

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

a. Kebijakan

1. Penanggulangan Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan yang disebabkan Alam, Non Alam merupakan tanggung jawab Bupati;
2. Penanggulangan Bencana dilakukan dengan cara penanganan sedini mungkin;
3. Dapat mengerahkan unsur-unsur pemerintah/swasta dan elemen-elemen penanggulangan bencana lainnya dalam mendukung operasi penanganan Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan;
4. Mengerahkan sumber daya yang ada dimasyarakat dalam kendali Pemerintah Daerah;
5. Mengajukan Dana Tak Terduga untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana;
6. Mengajukan permohonan dana siap pakai kepada BNPB, bila kemampuan daerah tidak mencukupi.

b. Strategi

Mengingat luasnya daerah serta besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat, berbagai peristiwa Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan dalam skala besar maupun kecil diperlukan pemantauan dan pengendalian yang melibatkan seluruh unsur Kepemerintahan, Badan Usaha/ Perusahaan serta elemen masyarakat, untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai strategi pencegahan, diantaranya sebagai berikut :

1. Membuat himbauan serta Instruksi yang ditujukan kepada Instansi, Pihak Perusahaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terhadap Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan.
2. Memasang spanduk serta pamflet himbauan.
3. Menyebarkan informasi Bencana Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan melalui media elektronik setempat;
4. Membentuk TIM Pengendalian Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan;
5. Mengaktifkan POSKO dan menyiapkan sumber daya yang ada untuk pemantauan dan pengendalian;
6. Operasi Penanganan dilakukan secara simultan dengan mengintegrasikan tindakan penanganan sedini mungkin;

7. Memanfaatkan teknologi tepat guna yang mampu menekan hingga sekecil mungkin potensi Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan serta mencegah kemungkinan terjadinya bencana serupa dimusim depan.

III. POLA PENANGANAN

Pola penanganan Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya kesiapsiagaan dengan tanggap darurat.

1. Kebakaran Hutan Lahan dan Pekarangan yang berpotensi Bencana Kabut Asap

a. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kegiatan tersebut berupa :

1. Pemantauan cuaca dan kondisi udara serta tingkat kelembaban tanah dan vegetasi yang memungkinkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta arah angin yang mengontrol penyebaran polusi asap.(Cq. BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);
2. Pemantauan titik panas (titik api) dilakukan dengan cara memantau jumlah titik panas yang muncul/ terlihat dari data satelit (Cq. BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);
3. Pemantauan titik api dilapangan (Cq. TIM);
4. Pemantauan kualitas udara (Indeks Standar Pencemaran Udara/ISPU) dilakuakn oleh unsur Lingkungan Hidup;
5. Pemantauan jarak pandang (Visibility) sebagai indikator atau parameter bencana dilakukan oleh BMKG;
6. Membentuk TIM Penanganan Bencana Kebakaran hutan Lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut asap secara terpadu yang melibatkan unsur Pemerintah, Swasta, elemen-elemen kebencanaan dan masyarakat yang dituangkan dalam keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Mengintensifkan melaksanakan penyuluhan pertanian dan perkebunan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk persiapan pertanamannya oleh Dinas terkait;
8. Memberikan maklumat larangan tidak membakar hutan dan lahan kepada masyarakat dan perusahaan oleh Bupati Kotawaringin Barat sampai ketingkat desa dan RT/RW.
9. Memberikan tindakan yang tepat bagi para pelaku pembakaran untuk memberikan efek jera bagi para pelaku oleh pihak berwenang.

b. Tanggap Darurat

Upaya tanggap darurat dilakukan secara terkoordinasi dan komando yang jelas sesuai kewenangan tingkat Nasional, Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengerahan sumber daya yang dilakukan pada tingkat nasional dikoordinasikan oleh BNPB dan Tingkat Propinsi dilakukan oleh BPBD Propinsi Kalimantan Tengah serta di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

1. Pemadaman Darat

- a. TIM Mengerahkan kekuatan personil dari berbagai unsur operasi dilokasi kebakaran;
- b. Setiap kejadian penting dilaporkan kepada Pusdalops/ Posko BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat atau SKPD yang memiliki fungsi Penanggulangan Bencana;
- c. Penyampaian data penangan bencana ke media massa melalui pusdalops/posko untuk menghindari kesimpangsiuran berita, atau pejabat Humas yang ditunjuk;
- d. Komando dilaksanakan oleh penanggungjawab (Incident Commander) oleh Bupati Kotawaringin Barat.

2. Pemadaman dari Udara

Jika diperlukan akan dilakukan koordinasi dengan pihak Propinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

2. Kekeringan

a. Kesiapsiagaan

Upaya Penanganan akan dilakukan sebagai berikut :

1. Pemantauan cuaca dan kondisi udara serta tingkat kelembaban tanah dan vegetasi yang memungkinkan terjadinya Kekeringan. (Cq. BMKG Kabupaten Kotawaringin Barat);
2. Pemantauan Daerah Rawan dilakukan dengan cara memonitor/ patroli kedaerah pemukiman masyarakat terkena dampak kekeringan yang dilakukan oleh TIM Monitoring;
3. Mendata titik air layak konsumsi terdekat yang dilakukan oleh TIM Monitoring;

b. Tanggap Darurat

Upaya tanggap darurat dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan seluruh Instansi, Badan Usaha serta elemen masyarakat.

1. Mengerahkan Sarana prasarana baik yang dimiliki oleh pihak Pemerintah maupun swasta;
2. Penyediaan Tandon air didaerah pemukiman dampak kekeringan;
3. Penyediaan Sumur Bor.

IV. KOORDINASI DAN RENCANA PELAKSANAAN

1. Bupati Kotawaringin Barat menjadi penanggungjawab utama penanggulangan bencana Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan;
2. Bupati Kotawaringin Barat dalam status tanggap darurat bencana menunjuk Komandan Penanganan Darurat (Incident Commander) untuk mengendalikan operasi;
3. Komandan Penanganan Darurat mempunyai tugas :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan;
 - b. Menyusun perencanaan dan kesiapsiagaan daerah berdasarkan tingkat kerawanan bencana;
 - c. Menyusun organisasi dilapangan;
 - d. Membuka Posko dilapangan dan mengaktifkan crisis centre;
 - e. Memberlakukan Rencana aksi menjadi perintah operasi tanggap darurat dalam rangka penanggulangan Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan jika eskalasi meningkat;
 - f. Membuka media centre;
 - g. Melaporkan tindakan yang telah diambil dan upaya serta saran-saran kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada BPBD Propinsi Kalimantan Tengah dan BNPB melalui Crisis Centre.
4. BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan tugas didukung oleh Instansi terkait, Badan usaha/ Perusahaan, elemen-elemen kebencanaan serta masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

V. PROYEKSI KEBUTUHAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYA

Dengan asumsi bahwa Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan terjadi disetiap tahunnya, maka dilakukan analisis sumberdaya sebagai berikut :

A. Kebutuhan Sumberdaya

Dengan mengacu pada kejadian bencana Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan tahun-tahun sebelumnya maka diperkirakan/diproyeksikan

kebutuhan sumberdaya sektor posko, pemadaman darat, kesehatan, serta logistik dan peralatan.

Kebutuhan sumberdaya dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarang yang berpotensi bencana kabut asap serta kekeringan ditunjukkan pada tabel 1-2-3-4 dan 5

Tabel 1.
Proyeksi kebutuhan Sumberdaya Sektor Posko

No.	Jenis Kebutuhan	Sat.	Jumlah			Sumber Dukungan
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan	
1.	Posko Induk	Buah	1	1	0	BPBD
2.	Posko Lapangan	Buah	6	6	0	BPBD
3.	Tenda Posko Lapangan	Buah	4	4	0	BPBD
4.	Posko Lapangan Tetap	Buah	3	3	0	BPBD
5.	Papan Informasi	Buah	1	1	0	BPBD
6.	Radio Komunikasi/HT	Buah	5	5	0	BPBD
7.	Antena Heig	Buah	2	2	0	BPBD
8.	RIG	Buah	1	1	0	BPBD
9.	Repeater	Unit	1	-	1	BPBD
10.	GPS	Buah	3	3	0	BPBD
11.	Camera	Buah	2	2	0	BPBD
12.	Motor Trail	Unit	2	2	0	BPBD
13.	Mobil Rescue	Unit	1	1	0	BPBD
14.	Senter Besar	Buah	2	2	0	BPBD
15.	Genset	Unit	6	2	4	BPBD
16.	Senter Besar	Buah	2	2	0	BPBD

Tabel 2.
Proyeksi kebutuhan sektor Pemadaman Api dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarang yang berpotensi bencana kabut asap

No.	Jenis Kebutuhan	Sat.	Jumlah			Sumber Dukungan
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan	
1.	Mobil Damkar	Unit	10	5	5	BPBD
2.	Mobil Tanki Air Suply	Unit	10	6	7	BPBD-Kehutanan-BKSDA
3.	Mesin Pompa	Unit	10	4	6	BPBD-Kehutanan-BKSDA
	- Mesin Apung	Unit	15	8	7	
	- Mesin Portable Darat	Unit				
4.	Alat Komunikasi (HT)	Buah	50	35	15	BPBD

Tabel 3.
Proyeksi kebutuhan sektor Pemenuhan Kebutuhan Air penanggulangan bencana Kekeringan

No.	Jenis Kebutuhan	Sat.	Jumlah			Sumber Dukungan
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan	
1.	Mobil Tanki Air Bersih	Unit	6	4	2	PDAM dan Damkar
2.	Mesin Pompa Portable	Unit	8	2	6	BPBD
3.	Tandon Air Bersih	Buah	60	0	60	Pemerintah Daerah

Tabel 4.
Proyeksi kebutuhan sektor Logistik dan Peralatan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan pekaranganyang berpotensi bencana kabut asap serta Kekeringan

No.	Jenis Kebutuhan	Sat.	Jumlah			Sumber Dukungan
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan	
1.	Tenda Pleton	Buah	1	1	-	BPBD
2.	Valbed	Buah	30	30	-	BPBD
3.	Kendaraan Logistik	Unit	1	1	-	BPBD

Tabel 5.
Proyeksi kebutuhan sektor Sumber Daya dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang berpotensi bencana kabut asap serta Kekeringan

No.	Jenis Kebutuhan	Sat.	Jumlah			Sumber Dukungan
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan	
1.	Petugas Piket	Orang	150	150	-	BPBD dan Unsur lainnya

B. Daerah Rawan Kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang berpotensi kabut asap serta Kekeringan.

Dengan mengacu pada kejadian bencana Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan tahun-tahun sebelumnya serta Kegiatan pemantauan/Patroli TIM maka dapat diproyeksikan daerah bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang berpotensi bencana kabut asap serta kekeringan ditunjukkan pada tabel 1-2-3 dan 4

Tabel 1.
Proyeksi Daerah Rawan bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang berpotensi bencana kabut asap

No.	Lokasi Rawan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan	Daerah Rawan/Hektar
1.	Jl. P. Bun- Ktw. Lama	22350
2.	Batu Belaman	578
3.	Desa Kubu	266
4.	Desa Kumpai Batu Atas	143
5.	Desa Kumpai Batu Bawah	253
6.	Desa Makarti Jaya	189
7.	Desa Kebun Agung	172
8.	Desa Sebuai	259
9.	Desa Keraya	184
10.	Desa Sei Tendang	193
11.	Desa Uambang	51
12.	Desa Karang Anyar	269
13.	Desa Seberang Gajah	157
14.	Desa Penyombaan	248
15.	Desa Kerabu	239
16.	Desa Sambu	191
17.	Mendawai Seberang	1044
18.	Pangkalan Bungur	258
19.	Desa Lalang	57
20.	Desa Rungun	62
21.	Desa Ipuh Bangun Jaya	88
22.	Desa Riam Durian	46
23.	Desa Sido Mulyo	36
24.	Desa Sungai Sekonyer	35021
25.	Desa Sungai Bedaun	11353
26.	Desa Teluk Bogam	3188
27.	Desa Teluk Pulai	12654
28.	Desa Sungai Cabang	15712
Total		105.261

Tabel 2.
Peta Daerah Rawan bencana kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang berpotensi bencana kabut asap

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kawasan yang dilanda ancaman kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana, ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelas indeks ancaman. Perhitungan untuk mendapatkan kelas indeks ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana dalam dokumen kajian risiko bencana daerah. Untuk mendapatkan kelas indeks kebakaran hutan dan lahan merujuk kepada parameter dari jenis hutan dan lahan, curah hujan tahunan, dan jenis tanah sehingga menghasilkan skor bahaya. Berdasarkan hasil analisis kajian risiko didapatkan indeks ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah rendah, sedangkan indeks penduduk terpapar adalah tinggi berdampak pada **25.184 jiwa** yang tinggal atau beraktivitas di kawasan terancam. Dengan demikian, tingkat ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **TINGGI**

PETA RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Legenda

- Pemukiman
- Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Kelurahan
- Batas Desa

Jaringan Jalan

- Jalan Utama
- Jalan Koorder
- Jalan Lokal
- Jalan Selengkap

Indeks Risiko

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Rendah Sederang Tinggi

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Unit Grid :
Ulangi: bujur dengan interval Antar Grid 0.5 derajat

Unit Datum :
WGS 84

Sumber Lantar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
United Nations Development Programme (UNDP)

Skala
1 : 400 000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 4 km di lapangan

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) tingkat Kabupaten. Penggambaran batas administratif dan nama program, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan persetujuan resmi dari BNPB.

Peta Dasar
Peta Digital Kabupaten Skala 1 : 50 000, Bakosurtanal, 2008

Batas Administrasi
BPS, 2010

Sumber Data :
- Peta Zonasi Risiko Bencana Kabupaten, BNPB, 2012, dengan menggunakan 3 komponen, yaitu: Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- Formula Risiko yang digunakan $R = H \cdot V / C$
- Data metodologi dan koefisien parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012

Logo BNPB
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Logo Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah

Disusun Oleh : PE Caheline Susa Permana

Tabel 3.
Proyeksi Daerah Rawan bencana Kekeringan

No.	Lokasi Rawan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan	Kecamatan	Jumlah yang terdampak/KK	Tandon yang diperlukan/ 3000 Liter
1.	Desa Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	272	8 Buah
2.	Desa Amin Jaya	Pangkalan Banteng	189	4 Buah
3.	Desa Sungai Hijau	Pangkalan Banteng	84	2 Buah
4.	Desa Arga Mulya	Pangkalan Banteng	177	2 Buah
5.	Desa Sei Pakit	Pangkalan Banteng	63	1 Buah
6.	Desa Karang Sari	Pangkalan Banteng	59	1 Buah
7.	Desa Makarti Jaya	Pangkalan Lada	88	2 Buah
8.	Desa Kadipi Atas	Pangkalan Lada	34	1 Buah
9.	Desa Pangkalan Tiga	Pangkalan Lada	102	2 Buah
10.	Desa Pandu Senjaya	Pangkalan Lada	134	3 Buah
11.	Desa Lada Mandala Jaya	Pangkalan Lada	266	6 Buah
12.	Desa Sei Malawen	Pangkalan Lada	59	1 Buah
13.	Desa Desa Sei Rangit Jaya	Pangkalan Lada	219	4 Buah
14.	Desa Pangkalan Durin	Pangkalan Lada	82	2 Buah
15.	Desa Purbasari	Pangkalan Lada	97	2 Buah
16.	Desa Sumber Agung	Pangkalan Lada	65	1 Buah
17.	Desa Teluk Pulai	Kumai	198	3 Buah
18.	Desa Sei Cabang	Kumai	91	2 Buah
19.	Desa Sukarami	Arut Utara	68	1 Buah
20.	Desa Sambu	Arut Utara	42	1 Buah
21.	Desa Pandau	Arut Utara	34	1 Buah
22.	Desa Panahan	Arut Utara	22	1 Buah
Jumlah			2445 KK	51 Buah

Tabel 4.
Peta Daerah Rawan Bencana Kekeringan

Berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana, ancaman bencana kekeringan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelas indeks ancaman. Perhitungan untuk mendapatkan kelas indeks ancaman dari luas kawasan terpapar dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana dalam dokumen kajian risiko bencana daerah. Kelas indeks kekeringan merujuk kepada parameter dari peta SNI kekeringan, curah hujan tahunan, tutupan vegetasi sehingga menghasilkan skor bahaya.

Berdasarkan hasil analisis kajian risiko didapatkan indeks ancaman bencana Kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sedang, sedangkan indeks penduduk terpapar adalah sedang dan berdampak pada **225.818 jiwa** yang tinggal atau beraktivitas di kawasan terancam. Dengan demikian, tingkat ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **SEDANG**.

PETA RISIKO BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Legenda

Permukiman	Batas Administrasi
Bender Udara	Batas Provinsi
Pelabuhan	Batas Kabupaten
Kota Utama	Batas Kecamatan
Saluran Irigasi	Batas Desa
Sungai	
Jaringan Jalan	
Jalan Utama	
Jalan Kolektor	
Jalan Loka	
Jalan Setapak	

Indeks Risiko

Inset Map: A small map of Kalimantan showing the location of West Kotawaringin Regency in the central part of the island.

Proyeksi Lokal: UTM Meridional

Unit Grid: UTM, 600m dengan interval Antar Grid 0.5 derajat

Unit Datum: WGS 84

Gambar Latar: ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara: United Nations Development Programme (UNDP)

Skala: 1 : 400.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 4 km di lapangan

ID Peta: Peta_Risiko_Kekeringan
Diklat Tanggal: 24 September 2012

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer: Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) tingkat kabupaten. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi; nama-nama tersebut sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengakuan resmi dari BNPB.

Peta Dasar: Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi: BPS, 2010

Sumber Data:

- 1. Hasil Penelitian Risiko Bencana Kabupaten, BNPB, 2012, Uraian menggunakan 3 komponen utama, yaitu: Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C)
- 2. Formula Risiko yang digunakan R + H x V x C
- 3. Data meteorologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, (BNPB), 2012

Logos: BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) and Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (BKAB).

Footer: Jember, 14 Agustus 2012, 11:20 WIB
Desain Oleh: PT. Caharina Grafika Perasta

C. PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT

1. Rencana Aksi ini berlaku sebagai rencana kontijensi penanggulangan Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Untuk menindaklanjuti rencana kontinjensi/ rencana aksi terpadu ini dilakukan pertemuan rutin untuk pemutakhiran/ validasi data dan sumber daya;
3. Apabila terjadi Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan yang memerlukan penanganan segera/ mendesak, maka rencana aksi terpadu ini diberlakukan sebagai rencana operasi Incident Command System (ICS).

D. PENUTUP

Demikian rencana aksi terpadu ini dibuat untuk kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya Kebakaran hutan, lahan dan Pekarangan yang berpotensi Kabut Asap serta Kekeringan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, kiranya dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mengambil langkah-langkah dalam rangka pengendalian bencana tersebut . Untuk dokumen ini masih sangat terbuka untuk ditinjau dan diperbaharui guna memperoleh hasil yang baik.

Pangkalan Bun 15 Januari 2016

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,**

Drs. HERMON,M.Si
NIP. 19681129 198709 1 001